

RECONQUISTA DAN INKUISISI DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN (STUDI ATAS DE-ISLAMISASI SEJARAH SPANYOL)

Siti Masykuroh^a, Agus Mahfudin Setiawan^b

sitimasykuroh@radenintan.ac.id, agus.mahfud@radenintan.ac.id

^{a b} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 10th January 2026

Revised: 16th April 2026

Accepted: 28th April 2026

Published: 28th April 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i3.338>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRACT

This research departs from the fundamental question of how the Reconquista and the Inquisition operated not simply as military events or religious institutions, but as a structured project of power to eliminate Islamic identity from the social, cultural, and historical landscape of the Iberian Peninsula. Using a historical-critical approach combined with the analysis of power discourse in the production of historical narratives, this study shows that the post-1492 process of de-Islamization is a political strategy that is carried out systematically through the elimination of Islamic visual symbols, the destruction of Arabic-language intellectual treasures, and the rewriting of history within the framework of a Christian hegemonic narrative. The findings of the study indicate that the Inquisition functioned not only as a religious institution that oversaw the orthodoxy of the faith, but also as an ideological mechanism of the state to reset the boundaries of people's identities, beliefs, and collective memories. Through repressive practices against the Morisco community and institutionalized cultural censorship, the Inquisition reinforced the Reconquista agenda of consolidating the power of the Catholic monarchy and removing Islamic heritage from the public sphere as well as official historiography. Thus, the disappearance of the traces of Islam in Spain cannot be understood as a secondary effect of religious conflict, but rather as the essence of a consciously designed historical and cultural engineering. This conclusion confirms that post-Reconquista Spanish history needs to be read in the framework of power relations that not only construct the past, but also form the foundations of modern national identity.

KEYWORDS:

Reconquista, Spanish Inquisition, De-Islamization, Critical Historiography, Power and Memory

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar tentang bagaimana Reconquista dan Inkuisisi beroperasi bukan sekadar sebagai peristiwa militer atau institusi keagamaan, melainkan sebagai proyek kekuasaan yang terstruktur untuk mengeliminasi identitas Islam dari lanskap sosial, kultural, dan historis Semenanjung Iberia. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis yang dipadukan dengan analisis wacana kekuasaan dalam produksi narasi sejarah, kajian ini menunjukkan bahwa proses de-Islamisasi pasca-1492 merupakan strategi politik yang dijalankan secara sistematis melalui penghapusan simbol-simbol visual Islam, pemusnahan khazanah intelektual berbahasa Arab, serta penulisan ulang sejarah dalam kerangka narasi hegemonik Kristen. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Inkuisisi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang mengawasi ortodoksi iman, tetapi juga sebagai mekanisme ideologis negara untuk mengatur ulang batas-batas identitas, keyakinan, dan ingatan kolektif masyarakat. Melalui praktik represif terhadap komunitas Morisco dan sensor budaya yang terlembaga, Inkuisisi memperkuat agenda Reconquista dalam mengonsolidasikan kekuasaan monarki Katolik dan menyingkirkan warisan Islam dari ruang publik maupun historiografi resmi. Dengan demikian, penghilangan jejak Islam di Spanyol tidak dapat dipahami sebagai dampak sekunder dari konflik agama, melainkan sebagai inti dari rekayasa historis dan kultural yang dirancang secara sadar. Kesimpulan ini menegaskan bahwa sejarah Spanyol pasca-Reconquista perlu dibaca dalam kerangka relasi kuasa yang tidak hanya mengonstruksi masa lalu, tetapi juga membentuk fondasi identitas nasional modern.

KATA KUNCI:

Reconquista, Inkuisisi Spanyol, De-Islamisasi, Historiografi Kritis, Kekuasaan dan Memori

PENDAHULUAN

Sejarah Spanyol tidak dapat dilepaskan dari jejak panjang peradaban Islam yang membentuk karakter Semenanjung Iberia selama lebih dari tujuh abad. Sejak penaklukan Muslim pada tahun 711 M, wilayah yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan praktik toleransi antarumat beragama di dunia abad pertengahan.¹ Namun, kejayaan tersebut mulai tergerus ketika kekuatan Kristen di utara memulai kampanye panjang yang dikenal sebagai Reconquista, yakni upaya militer sekaligus ideologis untuk merebut kembali wilayah yang berada di bawah kekuasaan Muslim serta menghapus jejak Islam dari lanskap Eropa.

Proses ini berakar dari kemenangan pasukan Muslim atas kerajaan Visigoth dalam Pertempuran Guadalete tahun 711 M, yang menandai runtuhnya kekuasaan Raja Roderic dan membuka jalan bagi ekspansi cepat pasukan Umayyah di bawah pimpinan Thariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nushair ke hampir seluruh Semenanjung Iberia dalam waktu singkat. Menurut Ibn al-Khatib dalam *al-Ihatha fi Akhbar Gharnata*², ekspansi tersebut tidak semata-mata merupakan agresi militer, melainkan juga dipengaruhi oleh konflik internal Visigoth yang mendorong sebagian pihak meminta bantuan kepada pasukan Muslim. Keberhasilan penaklukan ini, sebagaimana dicatat Ibn al-Khatib, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh keretakan politik lokal serta pendekatan inklusif Muslim terhadap penduduk non-Muslim.³ Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Ritonga dan Hamzah (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan Thariq ibn Ziyad pada periode 711-714 tidak hanya bergantung pada strategi militer, tetapi juga pada kemampuannya memanfaatkan kondisi sosial-politik Visigoth yang sedang terfragmentasi.⁴

Seiring waktu, penaklukan wilayah-wilayah Muslim oleh kerajaan-kerajaan Kristen di Semenanjung Iberia berkembang dari konflik perbatasan menjadi proyek ekspansi teritorial yang dilegitimasi secara keagamaan dan dilembagakan oleh otoritas Gereja. Dalam historiografi modern, proses ini kerap dipahami sebagai bentuk *perang salib lokal*, yakni perang yang dijalankan dalam konteks regional Iberia tetapi menggunakan kerangka teologis,

¹ Rahmat Iqbal and Agus Mahfudin Setiawan, "PERPUSTAKAAN ISLAM CORDOBA: KIBLAT PERADABAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DINASTI BANI UMAYYAH II 961-976 M," *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 3, no. 1 (2024): 1-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i1.1386>; Mahfudhoh Ainiyah and Agus Mahfudin Setiawan, "The Brilliant Legacy of Islam in Andalusia 711-1492: The Influence of Islamic Civilization's Golden Age on Europe's Renaissance," *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2024).

² *al-Ihatha fi Akhbar Gharnata* adalah sebuah karya sejarah monumental yang ditulis oleh Ibn al-Khaṭīb (1313-1374 M), seorang sejarawan, penyair, dan politisi Muslim dari Andalusia (Granada). Buku ini dianggap sebagai salah satu sumber primer terpenting dalam mempelajari sejarah kota Granada, termasuk politik, kebudayaan, kehidupan ilmiah, serta tokoh-tokoh pentingnya.

³ Hugh Kennedy, *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus* (Routledge, 2014) P.9-15.

⁴ Muhammad Akbar Ritonga and Johan Septian Putera Hamzah, "Strategi Thariq Bin Ziyad Menaklukkan Andalusia 711-714 M," *Journal of Islamic History* 1, no. 2 (2021): 138-69, <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jih.v1i2.102>.

simbolisme religius, dan mekanisme legitimasi yang sejalan dengan tradisi perang salib Kristen secara lebih luas.⁵ Kerangka ini tercermin dalam keterlibatan kepausan, serta penyematan makna religius pada perang melawan kekuasaan Islam. Namun demikian, keberhasilan ekspansi Kristen tersebut juga sangat ditentukan oleh kondisi internal Al-Andalus, terutama fragmentasi politik pasca-runtuhnya otoritas Umayyah, rivalitas antar kerajaan *ṭā'ifah*, serta melemahnya kapasitas pemerintahan dan kohesi sosial.⁶

Kampanye Reconquista juga menunjukkan bagaimana pihak Kristen berupaya membentuk kembali identitas Spanyol secara eksklusif berdasarkan agama Kristen. Sejarahwan kontemporer Anwar G. Chejne menyoroti bahwa salah satu dampak penting dari Reconquista adalah upaya sistematis untuk menghapus jejak peradaban Islam dari identitas sejarah Spanyol. Setelah umat Islam terusir dari Semenanjung Iberia, berbagai warisan intelektual dan budaya mereka mulai dipandang negatif dan bahkan sengaja disingkirkan. Warisan Islam tidak hanya diabaikan, tetapi juga dicitrakan sebagai sesuatu yang asing dan bertentangan dengan nilai-nilai Kristen Eropa. Padahal, menurut Chejne, justru warisan ilmiah, seni, dan filsafat dari peradaban Islam, yang berkembang di Al-Andalus, telah memberi kontribusi besar terhadap kemajuan Eropa pada Abad Pertengahan.⁷

Salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses de-Islamisasi di Spanyol pasca-Reconquista adalah berdirinya lembaga Inkuisisi Spanyol (*Spanish Inquisition*) pada akhir abad ke-15. Didirikan secara resmi oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile pada tahun 1478 dengan persetujuan Paus Sixtus IV, lembaga ini memiliki tujuan utama untuk "memurnikan" agama Kristen Katolik dari unsur-unsur kepercayaan yang dianggap menyimpang. Dalam praktiknya, Inkuisisi menjadi alat negara dan gereja untuk mengawasi, mengadili, dan menghukum individu yang dicurigai sebagai "Kristen palsu," terutama para Muslim muallaf (*Morisco*) dan Yahudi muallaf (*Converso*) yang dituduh masih mempertahankan keyakinan lamanya secara rahasia.⁸ Problem utama yang muncul adalah bagaimana lembaga keagamaan, dalam hal ini Gereja Katolik, bekerja sama dengan otoritas politik dalam merekonstruksi sejarah dan identitas nasional dengan cara menghilangkan jejak peradaban sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam historiografi, sejauh mana narasi sejarah yang dominan merepresentasikan kebenaran, dan sejauh mana ia merupakan hasil

⁵ Joseph F O'callaghan, *A History of Medieval Spain* (Cornell University Press, 2013) p.1-7.

⁶ Kennedy, *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus* p. 181-210.

⁷ Peter Von Sivers, "Anwar G. Chejne, *Muslim Spain: Its History and Culture* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1974). Pp. Xvi + 559.," *International Journal of Middle East Studies* 6, no. 3 (1975): 345-47, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020743800022911>.

⁸ Rasyidah Arshad, Syaidatun Nazirah & Nurul Shahirah, *The Impact of Spanish Inquisition on Islamic Civilization*, *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara*, Vol. 21, No. 1 (2020), p. 200-201.

konstruksi kekuasaan? Inkuisisi Spanyol menjadi contoh konkret bagaimana sejarah tidak hanya dibentuk oleh fakta, tetapi juga oleh kuasa yang mengatur makna, ingatan, dan siapa yang berhak menentukan identitas.

Sebagian besar narasi sejarah tentang Reconquista dan Inkuisisi ditulis dari sudut pandang pemenang, yakni monarki Katolik dan gereja, yang cenderung menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap identitas Kristen Spanyol. Warisan peradaban Islam di Al-Andalus kerap dihapus atau direduksi dalam ingatan sejarah resmi. Hal ini menimbulkan problem akademik penting, bagaimana sejarah digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengatur siapa yang dikenang dan siapa yang dilupakan. Kajian ini menggunakan pendekatan historiografi kritis untuk meninjau ulang konstruksi sejarah tersebut—dengan mempertanyakan aktor, motif, dan bias di balik narasi dominan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan baru atas Inkuisisi, tidak semata sebagai lembaga keagamaan, tetapi sebagai alat hegemonik untuk menyingkirkan jejak Islam secara sosial, budaya, dan politik. Secara ilmiah, relevansi kajian ini tidak hanya terletak pada konteks masa lalu, tetapi juga pada situasi masa kini, di mana persepsi terhadap Islam di Barat masih sering diliputi prasangka dan stereotip. Kajian ini berupaya memberi pemahaman yang lebih adil dan menyeluruh terhadap hubungan Islam dan Eropa, serta menyoroti pentingnya membaca ulang sejarah dengan lebih kritis dan inklusif.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas aspek historis Reconquista dan Inkuisisi di Spanyol dari berbagai sudut pandang. Misalnya, skripsi Bakhithah Laily Bil Jannah (2024) dengan tema “Reconquista: Mengungkap Jejak Sejarah Muslim di Spanyol” menggambarkan jalannya Reconquista secara kronologis dan menyoroti dinamika politik sebelum runtuhnya Granada, serta peran Inkuisisi dalam membubarkan komunitas Morisco, dengan menggunakan teori politik dan fungsionalisme Parsons untuk menjelaskan perubahan struktur sosial pasca-1492.⁹ Penelitian lain oleh Nur Fitriyana (2016) dalam artikel “Inkuisisi Gereja Katolik Terhadap Umat Islam Spanyol” yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 17 No. 2, menganalisis sistem kelembagaan Inkuisisi Katolik dan strateginya dalam mengidentifikasi kelompok “heretik”, termasuk Muslim dan Yahudi muallaf, dengan menekankan peran agama sebagai instrumen pengawasan sosial.¹⁰ Sementara itu, Abdul Rahman Matondang dkk. (2023) dalam kajian “Sejarah Islam di Spanyol: Dualisme Makna antara Penyebaran Agama dan Kolonialisme Islam” menyoroti kompleksitas sejarah Islam di Spanyol melalui pembahasan dualisme antara penyebaran agama dan bentuk awal kolonialisme sebelum terjadinya Reconquista. Namun demikian, penelitian-

⁹ Bakhithah Laily Jannah, Bil (2024) Reconquista: mengungkap jejak sejarah muslim di Spanyol. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2024), p.45-91

¹⁰ Nur Fitriyana Nur Fitriyana, “INKUISISI GEREJA KATOLIK TERHADAP UMAT ISLAM DI SPANYOL,” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (January 24, 2017): 213-230, <https://doi.org/10.19109/jia.v17i2.1085>.

penelitian tersebut cenderung berhenti pada deskripsi peristiwa dan analisis struktural, serta belum secara mendalam mengkaji bagaimana narasi sejarah itu sendiri dikonstruksi sebagai instrumen kekuasaan dalam proses de-Islamisasi, yang menjadi fokus utama dalam artikel ini.

Kajian mereka memperlihatkan bahwa warisan budaya Islam—meski berperan dalam perkembangan ilmu dan budaya—belakangan harus menghadapi represi struktural dari kekuasaan Kristen.¹¹ Namun, meski memberikan dasar kuat, riset-riset tersebut masih berhenti pada pendeskripsian peristiwa, kurang menggali analisis naratif sejarah sebagai konstruksi kekuasaan, serta belum mengeksplorasi bagaimana Inkuisisi beroperasi sebagai instrumen hegemonik dalam penghapusan simbol-simbol Islam. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan historiografi kritis, yang tidak hanya menelusuri fakta-fakta sejarah, tetapi juga mempertanyakan siapa yang menulis sejarah, dalam konteks kekuasaan siapa, dan bagaimana narasi dominan terbentuk untuk menyingkirkan kelompok tertentu dari ingatan kolektif. Dengan cara ini, penelitian ini tidak sekadar menampilkan peristiwa Inkuisisi sebagai realitas historis, melainkan membacanya sebagai strategi kuasa yang membentuk identitas, merancang memori, dan memonopoli legitimasi sejarah Spanyol pasca-Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historiografi kritis¹² yang memandang sejarah bukan sekadar rekonstruksi kronologis peristiwa, melainkan sebagai hasil produksi narasi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, analisis relasi kuasa merujuk pada perspektif Michel Foucault tentang kekuasaan sebagai praktik yang tersebar dalam wacana, serta diperkaya dengan pendekatan historiografi postkolonial dan studi memori kultural (*cultural memory studies*) untuk melihat bagaimana ingatan kolektif dibentuk, diseleksi, dan dinegosiasikan. Dengan demikian, sejarah dipahami sebagai arena produksi makna yang tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis dalam menentukan apa yang diingat dan apa yang dilupakan. Proses penelitian diawali dengan tahap heuristik, yakni pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya sejarah Islam klasik seperti *al-Iḥāṭah fī Akhbār Gharnāṭah* karya Ibn al-Khatib dan *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun¹³, serta dokumen dan catatan Eropa yang berkaitan dengan kebijakan

¹¹ Abdul Rahman Matondang, Sufrida Said, and Luthfi Luthfi, "Sejarah Islam Di Spanyol: Dualisme Makna Antara Penyebaran Agama Dan Kolonialisme Islam," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (2023): 169-84.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang Pustaka, 2005).

¹³ Ibn Khaldun, "The Muqaddimah, Trans. Franz Rosenthal," *The Muqaddimah: An Introduction to History*, 1958.

Reconquista dan praktik Inkuisisi Spanyol. Sumber sekunder mencakup kajian historiografi modern, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang membahas sejarah Islam di Spanyol, Reconquista, dan Inkuisisi. Pengumpulan sumber tidak hanya diarahkan pada pencarian data faktual, tetapi juga pada penelusuran teks-teks yang merepresentasikan narasi dominan serta wacana ideologis yang berkembang dalam historiografi Spanyol pasca-Reconquista, sehingga memungkinkan analisis kritis terhadap bagaimana kekuasaan bekerja dalam membentuk, membatasi, dan mengarahkan penulisan sejarah.

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, baik ekstern maupun intern, yang dilakukan secara operasional untuk memastikan validitas dan keberimbangan analisis. Kritik ekstern diarahkan pada penilaian keaslian dokumen, konteks produksi, latar institusional penulis, serta posisi sumber dalam struktur kekuasaan, khususnya dalam kaitannya dengan otoritas gereja dan monarki Katolik. Sementara itu, kritik intern difokuskan pada pembacaan isi teks dengan mengidentifikasi pilihan bahasa, diksi, serta kategori konseptual yang digunakan untuk merepresentasikan Islam, Muslim, dan kelompok “lain”. Bias sumber Katolik diidentifikasi melalui penelusuran istilah-istilah normatif seperti “heretik”, “murtad”, atau “pemurnian iman”, serta narasi yang menempatkan Islam sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan religius.

Selain itu, dilakukan analisis terhadap strategi legitimasi yang muncul dalam teks, seperti penggunaan otoritas teologis atau hukum gereja untuk membenarkan tindakan represif. Untuk menjaga keseimbangan interpretasi, sumber-sumber Muslim, seperti karya Ibn al-Khatib dan Ibn Khaldun, digunakan sebagai pembanding naratif guna melihat perbedaan perspektif dalam merepresentasikan peristiwa, aktor, dan dinamika sosial-politik. Perbandingan ini memungkinkan identifikasi terhadap apa yang dihilangkan, direduksi, atau direkonstruksi dalam historiografi dominan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membaca apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks, tetapi juga mengungkap dimensi yang disenyapkan dalam proses produksi sejarah. Dalam tahap interpretasi, sumber-sumber yang telah melalui kritik tersebut dianalisis menggunakan pendekatan historis-kritis dengan menempatkan fakta dalam kerangka relasi kuasa. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol, hukum, dan kebijakan keagamaan dalam membentuk narasi sejarah. Penekanan diberikan pada peran Inkuisisi sebagai mekanisme ideologis yang berfungsi menegaskan identitas Katolik Spanyol sekaligus meniadakan keberadaan Islam dari ruang sosial dan historiografi resmi. Proses ini disertai dengan eksplorasi tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penghilangan simbol Islam, seperti pelarangan bahasa, transformasi budaya, perubahan fungsi arsitektur, serta pemusnahan manuskrip, sebagai bagian dari proyek de-Islamisasi yang sistematis.

Secara spasial, penelitian ini difokuskan pada wilayah Spanyol selatan, khususnya bekas pusat-pusat peradaban Islam di Andalusia, seperti Granada, Cordoba, dan Seville, yang menjadi titik penting dalam proses transisi dari kekuasaan Islam ke dominasi Katolik. Secara temporal, batasan penelitian mencakup periode akhir kekuasaan Islam (abad ke-13 hingga ke-15) dan fase awal pasca-Reconquista, terutama dari tahun 1492 (jatuhnya Granada) hingga awal abad ke-17, saat pengusiran terakhir Morisco. Sedangkan secara tematik, penelitian berfokus pada aspek narasi sejarah, ideologi kekuasaan, dan penghapusan simbol peradaban Islam sebagai bagian dari proyek de-Islamisasi yang sistematis.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Andalus: Titik Puncak Peradaban Islam di Spanyol

Kehadiran Islam di Semenanjung Iberia—yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus—menandai salah satu fase paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam dan Eropa. Dimulai dari penaklukan oleh Thariq ibn Ziyad pada tahun 711 M, wilayah ini tumbuh menjadi pusat intelektual, budaya, dan spiritual yang menjembatani dunia Islam dan Barat. Al-Andalus bukan sekadar perluasan wilayah kekuasaan, melainkan juga medan pertemuan berbagai etnis, bahasa, dan tradisi yang melahirkan dinamika sosial multikultural yang relatif harmonis. Dalam beberapa abad masa kejayaannya, terutama pada era Kekhalifahan Umayyah di Cordoba (abad ke-10), Al-Andalus menjadi simbol keunggulan Islam dalam ilmu pengetahuan, filsafat, seni, arsitektur, serta toleransi antarumat beragama.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, wilayah ini berkembang menjadi medan pertemuan antara peradaban Islam, Kristen, dan Yahudi yang melahirkan sistem sosial multietnik dan multikultural. Budaya Arab-Islam yang dominan di kota-kota seperti Córdoba, Granada, dan Toledo menyerap serta memodifikasi unsur-unsur lokal, Visigothik, dan Romawi sebelumnya. Bahasa Arab menjadi bahasa utama ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan sastra, namun tetap ada ruang untuk bahasa Latin, Ibrani, dan dialek Romantik lokal, menunjukkan tingkat pluralitas budaya yang tinggi.¹⁶

Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah Córdoba (929-1031), Al-Andalus mengalami masa keemasan intelektual dan artistik. Córdoba pada masa pemerintahan 'Abd al-Rahmān III dan putranya al-Ḥakam II menjadi salah satu

¹⁴ Latifa Safoui, "From Heresy in Religion to Heresy in Culture: The Symbolic Power of the 15th Century Spanish Inquisition: The Case of the Arab Muslims (Moriscos)," *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)* ISSN 2356-5926 2, no. 2 (2023) p.1-2..

¹⁵ Iqbal and Setiawan, "PERPUSTAKAAN ISLAM CORDOBA: KIBLAT PERADABAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DINASTI BANI UMAYYAH II 961-976 M"; Agus Mahfudin Setiawan and Ahmad Sodikin, "MISI DAKWAH ISLAM MASA BANI UMAYYAH 661-750 M," *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023).

¹⁶ Thomas F Glick, *Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages* (Princeton University Press Princeton, NJ, 1979), p. 112-115.

kota terpadat dan termakmur di dunia, dengan lebih dari 500.000 penduduk, 70 perpustakaan, dan bahkan rumah sakit serta observatorium.¹⁷ Kegiatan penerjemahan besar-besaran dilakukan terhadap karya-karya filsafat Yunani dan ilmu pengetahuan Timur ke dalam bahasa Arab, yang kelak menjadi sumber penting bagi Renaisans Eropa.¹⁸

Salah satu tokoh besar dari era ini adalah Ibn Rushd (1126-1198 M), dikenal di Barat sebagai Averroes, seorang filsuf, dokter, ahli hukum Maliki, dan komentator Aristoteles yang produktif. Lahir di Córdoba dan mengabdikan diri di istana dinasti Almohad, Ibn Rushd menulis komentar mendalam terhadap hampir seluruh karya Aristoteles, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.¹⁹ Di Barat Latin, ia dikenal sebagai "The Commentator" karena otoritasnya dalam menjelaskan Aristoteles bahkan melampaui komentator Yunani sebelumnya seperti Alexander dari Aphrodisias. Gagasannya mengenai hubungan antara wahyu dan akal, serta otonomi filsafat dari teologi, membentuk dasar perdebatan filosofis Eropa abad pertengahan antara kalangan rasionalis dan skolastik, termasuk Thomas Aquinas yang menanggapi kritik Ibn Rushd terhadap teologi Kristen. Budaya intelektual Al-Andalus dengan demikian bukan sekadar reproduksi ilmu dari dunia Timur, tetapi turut mengembangkan pemikiran orisinal dalam filsafat, sains, dan teologi. Pusat-pusat intelektual seperti Córdoba, Toledo, dan Seville menjadi episentrum dialog antara dunia Islam dan Kristen yang mengubah lanskap keilmuan Eropa secara permanen

Di sisi lain, Al-Andalus juga dikenal sebagai laboratorium sosial tempat lahirnya identitas Islam Eropa yang khas—yakni Andalusian Islam—yang lebih kosmopolitan, terbuka terhadap seni dan filsafat, serta bersentuhan erat dengan komunitas non-Muslim yang hidup berdampingan. Sistem dhimmi yang diterapkan memberi status legal bagi umat Kristen dan Yahudi untuk mempertahankan agama mereka, meskipun dalam posisi subordinat secara politik. Meski tak lepas dari ketegangan atau diskriminasi, sistem ini memungkinkan munculnya fenomena *convivencia*, yakni koeksistensi antarumat beragama dan etnis dalam satu ruang social. Hal ini menjadikan al Andalus sebagai wilayah dengan tingkat toleransi beragama yang relatif tinggi dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Eropa Abad Pertengahan. Meskipun Islam adalah agama negara, pemerintahan Muslim di Al-Andalus mengakui status khusus bagi komunitas Kristen dan Yahudi, yang dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitāb* (pemeluk agama samawi). Mereka memiliki tempat ibadah sendiri,

¹⁷ Richard Fletcher, *Moorish Spain* (Berkeley: University of California Press, 1992), p. 85-90

¹⁸ Husna Amalina Sholihah and Khairunnisa Etika Sari, "Kontribusi Perpustakaan Islam Terhadap Era Renaisans Di Eropa: Perspektif Historis," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4, no. 2 (2023): 48-55, <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1921>; Siti Masykuroh, Uswatun Hasanah, and Agus Mahfudin Setiawan, *Sejarah Peradaban Islam: Pra Islam Hingga Tiga Kerajaan Besar Islam (Abad Ke 7-19)* (Lampung: RIL PRESS, 2024).

¹⁹ Oliver Leaman, *Averroes and His Philosophy* (Routledge, 2013), p. 3-5.

serta mengatur urusan internalnya secara otonom melalui sistem dhimmi. Sebagai imbalan atas perlindungan ini, mereka dikenai pajak jizyah, sementara umat Muslim membayar zakat.

Di kota-kota besar seperti Córdoba, Toledo, Granada, dan Sevilla, komunitas Muslim, Kristen Mozarab (Kristen yang tetap tinggal di bawah kekuasaan Islam), dan Yahudi Sefardim hidup berdampingan. Kota Toledo, khususnya setelah dikuasai kembali oleh Kristen pada 1085, tetap menjadi pusat penting transfer pengetahuan Islam melalui penerjemahan karya-karya filsafat, kedokteran, dan astronomi dari Arab ke Latin oleh para ilmuwan dari ketiga komunitas tersebut, seperti Gerard of Cremona, yang menerjemahkan lebih dari 70 karya ilmiah.²⁰ Konsep *convivencia*—sebuah istilah yang secara harfiah berarti “hidup bersama”—menjadi deskripsi historis yang digunakan oleh para sejarawan modern untuk menunjukkan pola koeksistensi relatif damai yang berlangsung di Al-Andalus antara abad ke-8 hingga ke-12. Meski *convivencia* tidak meniadakan adanya diskriminasi hukum dan insiden kekerasan (seperti kerusuhan anti-Yahudi di Granada pada 1066), secara umum iklim intelektual dan sosial di Al-Andalus jauh lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat Eropa Kristen yang pada saat itu mengalami berbagai bentuk eksklusi keagamaan.

Kaum Yahudi mengalami masa keemasan intelektual yang luar biasa di bawah perlindungan kekuasaan Islam di Al-Andalus, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah ‘Abd al-Rahmān III (912-961 M). Tokoh Yahudi seperti Ḥasdai ibn Shaprut (910-970 M), seorang dokter, ilmuwan, dan diplomat, memperoleh posisi strategis sebagai penasihat istana dan kepala delegasi diplomatik atas kepercayaan Khalifah ‘Abd al-Rahmān III. Ia memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan antara kekhalifahan Córdoba dengan kekuatan politik lainnya di Eropa dan dunia Mediterania.²¹ Dalam bidang ilmu pengetahuan, ia juga mendukung kegiatan penerjemahan karya ilmiah dari Yunani ke Arab dan Ibrani, serta menjadi pelindung para ilmuwan Yahudi.

Pada masa berikutnya, Mūsā ibn Maymūn (Maimonides, 1135-1204 M), yang dilahirkan di Córdoba dan dibesarkan dalam lingkungan Islam, tumbuh menjadi filsuf, dokter, dan tokoh hukum Yahudi yang besar. Dalam karya terkenalnya *Dalālat al-Ḥā’irīn* (The Guide for the Perplexed), yang ditulis dalam bahasa Arab menggunakan huruf Ibrani, Maimonides menunjukkan kedalaman pemikiran filsafat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi rasionalisme Islam, khususnya oleh al-Fārābī dan Ibn Sīnā.²²

²⁰ Charles Burnett, “The Coexistence of Muslims, Jews and Christians in Medieval Spain: Transfer of Scientific Knowledge,” *Science in Context* Vol. 14, No. 1-2 (2001): p. 247-259.

²¹ Maria Rosa Menocal, *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain* (Hachette UK, 2009), p. 83..

²² Moses Maimonides, *The Guide for the Perplexed*, vol. 351 (Courier Corporation, 1956).

Kontribusi kaum Yahudi terhadap budaya dan sains Al-Andalus menunjukkan karakter multikultural dan toleransi sistem sosial-politik Islam. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Muslim abad ke-14, Ibn Khaldūn, “peradaban tidak akan sempurna tanpa keikutsertaan berbagai kelompok yang hidup dalam keamanan dan partisipasi dalam ilmu pengetahuan.”²³

Dengan demikian, kejayaan Al-Andalus tidak hanya merepresentasikan puncak peradaban Islam di Eropa, tetapi juga menjadi dasar legitimasi historis yang kemudian dipandang problematis oleh kekuasaan pasca-Reconquista. Justru karena kekuatan simbolik dan intelektualnya yang begitu besar, warisan Al-Andalus menjadi sasaran utama dalam proyek de-Islamisasi, guna memutus kontinuitas memori dan pengaruh Islam dalam konstruksi identitas Spanyol.

Reconquista: Penaklukan Ulang dan Rekonstruksi Kuasa

Reconquista merupakan proyek jangka panjang yang berlangsung lebih dari tujuh abad, sejak penaklukan awal Muslim atas sebagian besar wilayah Semenanjung Iberia pada tahun 711 M hingga kejatuhan Granada pada tahun 1492. Gerakan ini tidak bersifat linier, melainkan penuh dengan dinamika politik, aliansi silang agama, dan perubahan kekuatan militer. Berbagai kerajaan Kristen di utara Semenanjung, seperti Asturias, León, Castile, Aragon, Navarre, dan Galicia, secara bertahap memperluas wilayah mereka ke selatan, melalui serangkaian perang dan integrasi politik, yang sekaligus menandai transformasi bertahap relasi kuasa dari dominasi Islam menuju konsolidasi kekuasaan Kristen berbasis identitas religius.

Salah satu momen awal yang dianggap sebagai tonggak Reconquista adalah Pertempuran Covadonga pada tahun 722 M, yang dipimpin oleh Pelayo (Pelagius), seorang bangsawan Visigothik. Setelah kekalahan kerajaan Visigoth oleh pasukan Muslim dalam Pertempuran Guadalete (711 M), banyak elit Kristen melarikan diri ke daerah pegunungan di wilayah utara, khususnya di Asturias. Di sinilah Pelayo mengorganisir perlawanan terhadap pasukan Muslim Umayyah. Dalam pertempuran tersebut, pasukan kecil Kristen berhasil mengalahkan kontingen Muslim yang dikirim untuk menghancurkan kelompok pemberontak. Meskipun dalam skala militer kemenangan ini relatif kecil, secara simbolis kemenangan ini menjadi fondasi awal dari upaya panjang untuk “merebut kembali” Semenanjung Iberia dari kekuasaan Islam.²⁴

Pelayo kemudian mendirikan Kerajaan Asturias, yang oleh sejarawan Kristen dianggap sebagai kelanjutan sah dari kerajaan Visigoth yang telah tumbang. Peristiwa Covadonga juga memiliki muatan religius yang sangat kuat -dianggap sebagai pertolongan ilahi terhadap umat Kristen yang setia. Dalam

²³ Ibn Khaldun and Vincent-Mansour Monteil, *Al-Muqaddima* (Sindbad, 1967); Khaldun, “The Muqaddimah, Trans. Franz Rosenthal.”

²⁴ Roger Collins, *The Arab Conquest of Spain: 710-797* (John Wiley & Sons, 1995), p.112-115.

konteks ini, Covadonga tidak hanya menjadi peristiwa militer, tetapi juga titik awal konstruksi identitas Kristen Iberia yang dibingkai sebagai identitas yang “dipulihkan” melalui legitimasi religious.²⁵ Narasi ini kemudian diperkuat dalam sumber-sumber historiografi Kristen abad pertengahan, seperti *Chronica Albeldensis* dan *Chronica Rotensis*, yang menggambarkan Pelayo sebagai pahlawan yang diutus untuk memulai kebangkitan kembali Kristen di tanah Iberia.²⁶

Kemenangan di Covadonga menjadi narasi pendiri identitas politik kerajaan-kerajaan Kristen utara dan membentuk dasar ideologis bagi legitimasi gerakan Reconquista, yakni bahwa perang yang dilancarkan terhadap Muslim bukan hanya pembebasan politik, tetapi juga misi religius untuk mengembalikan tanah yang dianggap “dijajah oleh kaum kafir”. Selanjutnya Kerajaan Asturias, kemudian berkembang sebagai pusat kekuatan Kristen di utara. Selama abad ke-8 dan ke-9, raja-raja Asturias seperti Alfonso I (739-757) dan Alfonso II (791-842) mulai melakukan ekspansi ke wilayah Galicia dan León, sambil mempertahankan garis pertahanan di pegunungan utara. Namun, konfrontasi militer pada periode ini masih bersifat defensif dan terbatas, karena umat Islam masih memegang kendali penuh atas wilayah tengah dan selatan Iberia.²⁷

Pada awal abad ke-10, pusat kekuasaan Kristen berpindah ke León, yang menjadi kelanjutan dari Kerajaan Asturias. Kerajaan León memainkan peran kunci dalam konsolidasi kekuatan Kristen dan memperluas wilayah ke selatan. Raja Ordoño II dan Ramiro II dari León mencatat sejumlah keberhasilan dalam ekspansi militer, namun tidak tanpa tantangan. Di saat yang sama, umat Islam di bawah Khilafah Umayyah Kordoba di bawah kepemimpinan Abd al-Rahmān III (912-961) mencapai puncak kejayaan dan menahan laju ekspansi Kristen. Invasi balasan yang dilakukan oleh Al-Mansur al-Ḥāḥib (981-1002), seorang jenderal kuat dari Kordoba, bahkan berhasil menjarah kota León dan Santiago de Compostela, menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak.²⁸

Momentum strategis bagi kerajaan Kristen datang setelah keruntuhan Khilafah Umayyah di Kordoba pada 1031 M, yang memicu munculnya negara-negara kecil Muslim yang disebut *mulūk al-ṭawā’if*. Fragmentasi politik ini membuat wilayah Muslim rentan terhadap invasi. Raja-raja Kristen, khususnya dari Castile dan León, memanfaatkan situasi ini dengan melancarkan kampanye militer dan memaksa para penguasa *ṭawā’if* membayar upeti (*parias*). Alfonso

²⁵ Jen Pearce, “Book Review: On Earth or in Poems: The Many Lives of Al-Andalus by Eric Calderwood,” *Literature & History* 33, no. 1 (May 1, 2024): 56-59, <https://doi.org/10.1177/03061973241248369>.

²⁶ Kenneth Baxter Wolf, *Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain*, vol. 9 (Liverpool University Press, 1999) p.131-135.

²⁷ Collins, *The Arab Conquest of Spain: 710-797*, p. 155-160.

²⁸ Kennedy, *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus*, p. 180-190.

VI dari León dan Castile menjadi figur sentral pada masa ini, dan berhasil merebut Toledo pada tahun 1085 M. Proses Reconquista mencapai titik balik ketika Toledo, ibu kota kuno kerajaan Visigoth dan salah satu pusat keilmuan penting dalam peradaban Islam di Al-Andalus, jatuh ke tangan Raja Alfonso VI dari León dan Castile pada tahun 1085 M. Peristiwa ini merupakan hasil dari kombinasi strategi militer dan diplomasi; Alfonso memanfaatkan kelemahan politik internal yang melanda negara-negara *ṭawā'if* (dinasti-dinasti Muslim kecil) pasca runtuhnya Khilafah Umayyah Kordoba pada 1031. Penguasa Toledo saat itu, al-Qādir, yang menghadapi tekanan dari rivalnya al-Mu'tamid dari Sevilla, memilih untuk bersekutu dengan Alfonso VI dengan imbalan perlindungan, namun akhirnya kehilangan kendali atas kotanya.²⁹

Kejatuhan Toledo tidak hanya bermakna sebagai kemenangan teritorial dan simbolik, tetapi juga menjadi titik penting dalam proses transfer pengetahuan dan kebudayaan Islam kepada dunia Kristen Eropa. Setelah penaklukan, Alfonso VI menjamin perlindungan terhadap penduduk Muslim dan Yahudi serta institusi keilmuan mereka. Hal ini membuka jalan bagi apa yang kelak dikenal sebagai Gerakan Penerjemahan Toledo, di mana karya-karya ilmiah berbahasa Arab dalam bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Proses ini memainkan peran penting dalam transformasi intelektual Eropa Latin dan menjadi salah satu fondasi kebangkitan intelektual Eropa pada masa Renaisans.³⁰ Setelah keberhasilan ini, raja-raja Castile melanjutkan ekspansi mereka ke jantung wilayah Islam. Fernando III dari Castile (berkuasa 1217-1252) berhasil menaklukkan Córdoba pada tahun 1236, kota yang sebelumnya menjadi pusat kekhalifahan dan simbol kejayaan Islam di Spanyol. Kemudian, pada tahun 1248, ia menaklukkan Seville, salah satu kota metropolitan terbesar dan terpenting di al-Andalus. Penaklukan dua kota ini secara efektif memutus keberlangsungan kekuasaan Islam di Andalusia bagian barat dan tengah, menyisakan Emirat Granada sebagai satu-satunya kekuatan Muslim yang bertahan hingga akhir abad ke-15.³¹

Aktor-aktor utama dalam fase akhir Reconquista adalah Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile, yang pernikahannya pada tahun 1469 menandai momen penting dalam konsolidasi politik Semenanjung Iberia. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua kerajaan Kristen yang paling berpengaruh saat itu, tetapi juga menciptakan sebuah konfigurasi kekuasaan

²⁹ Kennedy, *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus*, p. 197-200; Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century* (Taylor & Francis, 2022).

³⁰ Charles Burnett, "The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in Toledo in the Twelfth Century," *Science in Context* 14, no. 1-2 (2001): 249-288, <https://doi.org/DOI:10.1017/S0269889701000096>.

³¹ O'callaghan, *A History of Medieval Spain*. p. 197-200.

yang kuat dan terkoordinasi, yang kemudian menjadi fondasi dari Kerajaan Spanyol modern. Kesatuan dinasti ini memungkinkan terbentuknya struktur pemerintahan yang terpusat, serta menyatukan misi religius dan politik di bawah panji Katolik Roma. Melalui perjanjian dan kebijakan bersama, keduanya menyusun strategi sistematis untuk menyelesaikan proyek Reconquista, yang hingga saat itu berlangsung secara sporadis dan fragmentaris.³²

Setelah menyatukan kekuatan militer dan administratif, Ferdinand dan Isabella memulai kampanye militer besar-besaran melawan Emirat Granada, wilayah Muslim terakhir di Andalusia. Perang Granada yang berlangsung dari 1482 hingga 1492 menjadi puncak proyek Reconquista, melibatkan pengepungan bertahap terhadap berbagai kota Muslim, seperti Loja, Ronda, Málaga, dan akhirnya Granada. Selain kekuatan militer, mereka juga menggunakan strategi diplomatik dan psikologis, termasuk membina aliansi dengan bangsawan lokal, menyuap beberapa elit Muslim agar menyerah, dan menyebarkan propaganda religius yang mengangkat misi mereka sebagai “pembebasan tanah suci Kristen dari cengkeraman kafir.” Retorika resmi kerajaan sangat kental dengan bahasa keagamaan yang menggambarkan Reconquista sebagai misi suci pembebasan tanah suci dari tangan “infidel”³³. Ferdinand dan Isabella memanfaatkan citra keagamaan ini untuk membentuk narasi dominan bahwa Muslim adalah pendatang atau bahkan penjajah asing, meskipun kehadiran dan kekuasaan Islam telah berlangsung lebih dari tujuh abad di Spanyol, sejak penaklukan pada 711 M.³⁴ Narasi ini digunakan untuk membenarkan kampanye militer, politik asimilasi paksa, serta penindasan sistematis terhadap komunitas Muslim dan Yahudi.

Penaklukan Granada pada 2 Januari 1492 menandai akhir resmi dari kekuasaan Islam di Iberia, setelah hampir delapan abad keberadaannya sejak 711 M. Peristiwa ini ditandai dengan penyerahan kunci kota oleh Sultan Muhammad XII (Boabdil) kepada Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I, yang secara simbolis dimaknai sebagai “kemenangan iman atas bidah”. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga puncak rekayasa ideologis yang ditopang oleh simbol-simbol religius: Ferdinand dan Isabella memasuki Alhambra dengan membawa salib dan bendera Kristen sebagai tanda pemurnian tanah Iberia. Sejak saat itu, proyek rekonstruksi kuasa Katolik dijalankan melalui kebijakan intensif, seperti pembentukan Inkuisisi Spanyol (1478), konversi paksa, dan pengusiran komunitas Muslim dan Yahudi (1492 dan 1502),

³² O'callaghan. p. 443-448.

³³ “infidel” berasal dari bahasa Latin *infidelis*, yang berarti “tidak beriman” atau “tidak setia (dalam keimanan)”. Dalam konteks sejarah Eropa abad pertengahan -terutama selama era Perang Salib dan Reconquista- kata ini digunakan oleh umat Kristen untuk menyebut orang-orang non-Kristen, khususnya Muslim dan Yahudi, yang dianggap tidak percaya pada agama yang “benar” menurut pandangan Gereja Katolik.

³⁴ Brian A Catlos, *Kingdoms of Faith: A New History of Islamic Spain* (Oxford University Press, 2018), p. 337-340.

serta penghapusan struktur sosial-keagamaan Islam. Dengan demikian, pernikahan Ferdinand-Isabella bukan hanya penyatuan keluarga kerajaan, tetapi juga landasan ideologis dan operasional bagi ekspansi kekuasaan Kristen dan penghapusan warisan Islam dari sejarah resmi Spanyol

Dalam kerangka ini, rekonstruksi kuasa merujuk pada transformasi sistematis atas struktur sosial, budaya, dan religius yang sebelumnya bercorak Islam, menuju hegemoni tunggal Katolik-Kastilia. Proyek ini tidak hanya bersifat militer dan politis, tetapi juga melibatkan pembentukan narasi resmi, simbol-simbol keagamaan, dan kebijakan publik untuk menghapus jejak identitas Islam dan menanamkan dominasi ideologis Kristen Katolik. Upaya seperti pemberlakuan konversi paksa, penghancuran masjid dan madrasah, serta pelarangan bahasa Arab dan manuskrip Islam merupakan bagian dari rekayasa sosial-politik yang dimaksud. Dengan demikian, rekonstruksi kuasa pasca-Reconquista menjadi proses pembentukan tata kuasa baru, di mana sejarah ditulis kembali dari sudut pandang pemenang, dan kelompok-kelompok non-Kristen dimarjinalkan baik secara fisik maupun simbolik.

Inkuisisi: Penghapusan Identitas dan Produksi Ketakutan

Setelah jatuhnya Granada pada 1492, kemenangan politik dan militer Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile tidak berhenti pada aspek teritorial semata. Penaklukan ini menjadi titik balik dalam sejarah Iberia, mengakhiri delapan abad keberadaan kekuasaan Islam di Semenanjung tersebut. Lebih dari sekadar ekspansi wilayah, kemenangan tersebut melahirkan suatu proyek besar yang dikenal sebagai homogenisasi agama dan nasionalisasi identitas yang secara sistematis dimanifestasikan melalui institusi La Inquisición Española (Inkuisisi Spanyol). Tujuannya tidak lain adalah memurnikan Spanyol dari unsur-unsur yang dianggap non-Katolik, terutama komunitas Yahudi, Muslim, dan para conversos—yakni mereka yang telah memeluk Kristen secara nominal namun tetap dicurigai memegang keyakinan lama.

Inkuisisi bukanlah sekadar lembaga keagamaan internal Gereja, melainkan alat politik ideologis negara yang dikelola langsung oleh mahkota, dengan persetujuan Paus Sixtus IV melalui bulla tahun 1478, namun dengan otonomi penuh di tangan Kerajaan.³⁵ Fokus awalnya adalah mengawasi para conversos dari kalangan Yahudi (yang banyak mengisi jabatan administratif dan profesi strategis), namun dalam perkembangannya juga menyasar kaum Muslim yang disebut Moriscos. Di balik legitimasi moral untuk menegakkan kemurnian iman, tersembunyi kepentingan geopolitik; menciptakan masyarakat yang seragam secara ideologis dan loyal sepenuhnya terhadap tahta.

³⁵ Henry Kamen, *The Spanish Inquisition: A Historical Revision* (Yale University Press, 2014) p. 81.

Kebijakan ini dibangun atas asumsi bahwa stabilitas politik dan integrasi nasional hanya dapat dicapai melalui keseragaman dalam iman, di mana otoritas Gereja Katolik Roma dan monarki bersatu sebagai dua lengan kekuasaan. Oleh sebab itu, warisan kosmopolitan Al-Andalus -yang sebelumnya menjadi model pluralisme dan keragaman budaya- dihapus secara sistematis. Bahasa Arab dilarang, manuskrip dihancurkan, dan ekspresi kebudayaan non-Katolik dikecam sebagai bentuk bid'ah. Dalam tempo singkat, pluralitas yang pernah menjadi kebanggaan wilayah ini direduksi menjadi satu bentuk ordo baru yang represif, menandai babak kelam dalam sejarah Spanyol yang tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut transformasi brutal atas identitas kolektif masyarakat.

Lembaga Inkuisisi Spanyol (La Inquisición Española) secara resmi dibentuk pada tahun 1478 berdasarkan otorisasi Paus Sixtus IV melalui bulla papal, tetapi pelaksanaannya berada sepenuhnya di bawah kendali langsung monarki Spanyol, yakni Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Tidak seperti inkuisisi sebelumnya yang berada di bawah kendali penuh Gereja, versi Spanyol ini merupakan instrumen politik yang dikelola negara, mencerminkan sinergi antara kekuasaan gerejawi dan monarki dalam proyek unifikasi ideologis.³⁶ Target awal Inkuisisi adalah conversos—orang-orang Yahudi dan Muslim yang secara formal telah memeluk agama Kristen tetapi dicurigai masih mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa resmi, mereka dituduh melakukan crypto-Judaism atau crypto-Islam, dan dengan demikian, dianggap sebagai pelaku heresy (bid'ah) yang mengancam kemurnian doktrin Katolik.

Namun, makna heresy dalam praktiknya meluas secara represif, tidak hanya terbatas pada keyakinan teologis, melainkan juga menysar ekspresi kultural yang diasosiasikan dengan Islam dan Yudaisme. Orang bisa dituduh sesat hanya karena berpuasa pada hari-hari tertentu, menggunakan bahasa Arab dalam percakapan pribadi, menolak makan daging babi, atau menjalankan praktik pengobatan tradisional seperti ruqyah, bekam, dan penggunaan herbal yang diasosiasikan dengan warisan Muslim.³⁷ Data sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit tuduhan bersifat spekulatif dan berdasarkan delasi (pengaduan) dari masyarakat, menciptakan iklim ketakutan yang melumpuhkan ruang publik dan menyempitkan identitas kultural. Ulama dan sejarawan Muslim seperti Ahmad Ibn Yusuf al-Tifashi maupun al-Maqqari mencatat bahwa dalam konteks Spanyol pasca-1492, banyak umat Muslim yang terusir atau dipaksa murtad mengalami penderitaan kolektif akibat kehilangan hak atas budaya, bahasa, dan keimanannya. Proses de-Islamisasi pasca-penaklukan Granada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga psikologis dan simbolik. Al-Maqqarī (w. 1041

³⁶ Henry Kamen, *The Spanish Inquisition: A Historical Revision*.

³⁷ Lu Ann Homza, *Religious Authority in the Spanish Renaissance* (Johns Hopkins University Press, 2000).

H/1632 M), sejarawan dan ulama asal Tlemcen, dalam magnum opus-nya *Nafh al-Ṭīb min Ghuṣn al-Andalus al-Raṭīb*, mencatat bagaimana umat Islam di Granada hidup dalam atmosfer teror pasca-1492. Ia menulis:

كلمة واحدة بالعربية تُعدُّ تهمةً كافيةً للاعتقال، وحركة واحدة من الصلاة تُعدُّ دليلاً قاطعاً على التمرد ضدَّ

التاج الكاثولي

("Satu kata saja dalam bahasa Arab dianggap cukup sebagai tuduhan untuk penahanan, dan satu gerakan salat dianggap sebagai bukti pasti pemberontakan terhadap tahta Katolik.")³⁸ Pernyataan ini menggambarkan betapa identitas Islam direduksi menjadi bentuk kriminalitas, di mana bahasa, gerak tubuh, hingga nama-nama khas Arab menjadi bukti ketidaksetiaan terhadap negara. Banyak keluarga Muslim dipaksa mengganti nama, mengadopsi bahasa Castilian, dan melepaskan simbol-simbol Islam, seperti jilbab, adzan, dan bahkan sistem kalender Hijriyah. Bahkan praktik sehari-hari seperti mandi pada hari Jumat, makan makanan halal, atau berpuasa diam-diam dapat memicu penyelidikan Inkuisisi.

Sejarawan Muslim kontemporer seperti Ali al-ṣallābī menggambarkan munculnya kondisi yang ia sebut sebagai "umat yang ditindas dalam diam" (*al-umma al-makhdhūlah ṣamṭan*), yakni situasi ketika komunitas Muslim tidak hanya kehilangan wilayah dan kekuasaan politik, tetapi juga terpinggirkan dari narasi sejarahnya sendiri.³⁹ Tekanan struktural dan kebijakan represif mendorong sebagian Muslim Al-Andalus menjalani kehidupan sebagai *crypto-Muslims*, menjalankan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi demi mempertahankan identitas keagamaan mereka. Laporan-laporan pengadilan Inkuisisi menyebutkan penemuan mushaf al-Qur'an yang disembunyikan di dinding rumah atau salat yang dilakukan dalam ruang bawah tanah.⁴⁰ Situasi ini berlangsung selama lebih dari satu abad, hingga akhirnya Muslim Moriscos diusir secara massal mulai tahun 1609. Penderitaan kolektif ini tidak hanya meninggalkan trauma historis, tetapi juga membentuk kesadaran diaspora Islam di Afrika Utara, terutama di wilayah Maroko dan Tunisia, yang kemudian menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi dan keturunan Al-Andalus. Dengan demikian, Al-Maqqarī bukan sekadar mencatat nostalgia peradaban yang hilang, tetapi juga mewakili suara perlawanan kultural terhadap proses pembunuhan identitas yang dilakukan secara sistemik oleh rezim pasca-Reconquista.

Dengan demikian Inkuisisi Spanyol tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang mengawasi ortodoksi iman, tetapi juga sebagai instrumen

³⁸ Ahmad ben Muhammad al-Maqqari, *Nafh Al-Tib: Min Gusn Al-Andalus Al-Ratib* (Dar Sader, 1968), jld. 5, p. 345.

³⁹ Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *Al-Andalus min al-Faṭḥ ilā al-Suqūṭ* (Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 2009), p. 687-690.

⁴⁰ Mary Elizabeth Perry, "The Handless Maiden: Moriscos and the Politics of Religion in Early Modern Spain," 2013.

hegemonik yang bekerja secara sistematis dalam menghapus identitas Islam dari ruang sosial dan kultural. Mekanisme ini dijalankan melalui berbagai kebijakan yang menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan masyarakat. Dalam ranah bahasa, pelarangan penggunaan bahasa Arab menjadi langkah strategis untuk memutus transmisi pengetahuan dan tradisi intelektual Islam antar generasi. Dalam bidang literasi, kontrol ketat terhadap manuskrip dilakukan melalui penyitaan dan pembakaran kitab-kitab berbahasa Arab yang dianggap berpotensi mempertahankan ajaran Islam secara tersembunyi. Selain itu, pengawasan terhadap komunitas Morisco dilakukan secara intensif melalui sistem pelaporan, interogasi, dan pengadilan, yang menciptakan atmosfer ketakutan dan kecurigaan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini tidak hanya menargetkan keyakinan, tetapi juga kebiasaan budaya seperti pola makan, cara berpakaian, hingga ritual domestik yang dianggap mencerminkan identitas Islam. Di sisi lain, penghapusan simbol arsitektur Islam, seperti alih fungsi masjid menjadi gereja atau penghancuran elemen estetika Islam, menunjukkan bahwa Inkuisisi juga bekerja pada level visual dan spasial untuk merekonstruksi lanskap identitas secara fisik. Dengan demikian, Inkuisisi beroperasi sebagai mekanisme kuasa yang tidak hanya menekan secara represif, tetapi juga membentuk ulang identitas melalui kontrol bahasa, budaya, ruang, dan memori kolektif, sehingga memperkuat proyek de-Islamisasi dalam kerangka hegemoni Katolik Spanyol.

De-Islamisasi: Politik Ingatan dan Manipulasi Sejarah

Setelah kemenangan Reconquista dan diresmikannya dominasi Katolik atas Semenanjung Iberia, otoritas Spanyol melancarkan proyek sistematis de-Islamisasi yang menasar simbol-simbol visual, intelektual, dan material dari peradaban Islam. Masjid-masjid megah seperti Masjid Córdoba, yang pernah menjadi pusat spiritual dan ilmiah dunia Islam di Barat, dialihfungsikan menjadi gereja tanpa menghargai nilai historis dan spiritualnya. Dalam proses transformasi ini, bagian-bagian yang mengandung ornamen kaligrafi Arab, mimbar, dan mihrab dihancurkan atau disamarkan, lalu diganti dengan ikonografi Kristen seperti salib, patung Maria, dan altar gerejawi. Tindakan ini bukan hanya peralihan fungsi, tetapi merupakan bentuk kolonisasi makna yang bertujuan menghapus jejak spiritualitas Islam dari lanskap budaya dan arsitektur kota.

Lebih jauh, serangan tidak hanya bersifat fisik, melainkan intelektual. Proyek penghancuran meluas ke pusat-pusat ilmu, termasuk pembakaran besar-besaran terhadap ribuan manuskrip Arab di Granada, yang terjadi pada tahun 1499 atas perintah Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros. Peristiwa ini menjadi simbol puncak dari kebijakan pemusnahan ingatan kolektif umat Islam

melalui apa yang disebut para sejarawan modern sebagai cultural genocide.⁴¹ Manuskrip yang dimusnahkan tidak hanya berkaitan dengan teologi Islam, tetapi juga meliputi karya-karya kedokteran, filsafat, astronomi, dan sastra, yang menjadi fondasi penting bagi peradaban Eropa. Proses ini mencerminkan kecemasan ideologis otoritas Katolik terhadap kekuatan simbolik Islam yang tertanam kuat dalam memori dan ruang publik Andalusia. Akibatnya, ruang-ruang yang dulunya menjadi simbol keterbukaan, toleransi, dan keilmuan berubah menjadi monumen penaklukan dan represi. Politik amnesia kultural ini bertujuan mereset sejarah, menghapus warisan delapan abad kehadiran Islam di Spanyol dari kesadaran kolektif bangsa. Seperti dikemukakan oleh sejarawan Muslim kontemporer, Dr. Fuat Sezgin, penghancuran khazanah intelektual Islam di Andalusia bukan hanya kehilangan bagi umat Islam, tetapi juga luka epistemik bagi kemanusiaan global yang kehilangan mata rantai pengetahuan universal.⁴² Dalam konteks ini, de-Islamisasi bukan hanya soal dominasi religius, tetapi tentang kontrol atas narasi sejarah dan identitas masa depan bangsa.

De-Islamisasi pasca-Reconquista tidak hanya berlangsung di tingkat penghancuran fisik simbol-simbol Islam, tetapi juga menembus ranah epistemologis melalui penulisan ulang sejarah. Upaya ini dilakukan secara sistematis oleh sejarawan Katolik dan kronikus istana pada abad ke-16 dan ke-17 yang bertugas menciptakan narasi baru tentang masa lalu Semenanjung Iberia. Al-Andalus, yang dalam realitas historis merupakan pusat pencapaian keilmuan dan toleransi religius, digambarkan sebagai sebuah interupsi barbarik dalam perjalanan sejarah Kristen Eropa. Muslim diposisikan sebagai pendatang asing, penjajah, bahkan perusak tatanan yang sebelumnya telah mapan dalam warisan Romawi dan Visigoth. Narasi ini dikembangkan untuk menjustifikasi hegemoni Katolik dan menyucikan proyek Reconquista sebagai pemulihan tatanan ilahi.⁴³

Penulisan sejarah seperti ini berdampak pada terpinggirkannya kontribusi intelektual Islam terhadap peradaban Eropa. Sejarawan Muslim klasik seperti Ibn Khaldūn dan al-Maqqarī dalam *Nafh al-Ṭīb* menekankan bahwa Al-Andalus adalah bagian integral dari dunia Islam yang berkembang melalui sumbangsih ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Namun dalam narasi Katolik pasca-Reconquista, tokoh-tokoh seperti Ibn Rushd (Averroes), yang memainkan peran besar dalam mentransmisikan filsafat Yunani kepada dunia Latin, seringkali dihapus atau diposisikan sebagai pengecualian dari "kegelapan Timur". Bahkan bangunan monumental seperti Alhambra atau sistem irigasi canggih yang dikembangkan oleh umat Islam dinisbatkan pada 'pengaruh pra-

⁴¹ Rachel Arié, "L'Espagne Musulmane Au Temps Des Naşrides (1232-1492)," (EHESS), 1973.

⁴² Fuat Sezgin et al., *Zeitschrift Für Geschichte Der Arabisch-Islamischen Wissenschaften* (Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1984).

⁴³ Edward W Said, "Orientalism. New York: Pantheon Books," 1978.

Islam' atau diklaim sebagai adaptasi dari Romawi, untuk menutup kontribusi kreatif peradaban Islam.⁴⁴

Lebih jauh, reinterpretasi sejarah ini melahirkan sejarah resmi (official memory) yang menggantikan ingatan kolektif multikultural dengan memori tunggal berbasis Kristen Latin. Konsep ini sejalan dengan gagasan politics of memory yang disebutkan oleh Jan Assmann, yakni bagaimana kekuasaan berperan aktif dalam mengatur apa yang boleh dikenang dan apa yang harus dilupakan dalam konstruksi identitas nasional.⁴⁵ Dalam konteks Spanyol pasca-Reconquista, narasi sejarah disusun sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa eksistensi Muslim adalah anomali sejarah yang telah disingkirkan demi tegaknya kembali kemurnian iman dan bangsa. Alhasil, generasi pasca-Inkuisisi tumbuh dengan ingatan yang terputus dari delapan abad sejarah Islam yang sebetulnya membentuk fondasi intelektual dan kebudayaan Semenanjung Iberia.

Dengan demikian, upaya de-Islamisasi di Spanyol pasca-1492 bukan hanya bentuk penghapusan identitas keagamaan, tetapi juga proyek rekayasa sosial dan psikologis yang mendalam terhadap subjek-subjek yang tinggal di wilayah bekas kekuasaan Islam. Dalam kerangka ini, identitas nasional Spanyol yang sedang dikonstruksi oleh kekuasaan Katolik tidak memberi ruang bagi pluralitas warisan Andalusia. Menjadi "Spanyol" diartikan secara eksklusif sebagai menjadi "Katolik", dan segala bentuk afiliasi kultural dengan Islam dipandang sebagai bentuk subversi terhadap kemurnian nasional. Proses ini secara sistematis mengatur memori kolektif dan menormalisasi satu bentuk subjektivitas tunggal yang tunduk pada Gereja dan Monarki.

De Islamisasi juga mencakup larangan penggunaan bahasa Arab, penindasan terhadap ekspresi budaya Islamik seperti musik, puisi, dan kuliner, hingga penggantian nama-nama Arab dengan nama-nama baptisan Spanyol. Bahkan Morisco yang secara formal telah dibaptis Kristen tetap dianggap mencurigakan, sehingga mereka wajib menghilangkan setiap unsur Arab dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dokumen legal, surat-surat pribadi, dan dalam ranah sosial. Proses ini sebagaimana dicatat oleh sejarawan Ahmad bin Muhammad al-Maqqarī dalam *Nafh al-Ṭīb*, menciptakan masyarakat yang tercerabut dari akarnya, "terasing dari masa lalu yang mereka warisi, namun tidak sepenuhnya diterima oleh dunia yang memaksa mereka berubah."⁴⁶ Secara teoritik, fenomena ini selaras dengan analisis Michel Foucault tentang "produksi subjektivitas" oleh negara melalui pengawasan, disiplin, dan kontrol wacana. Dalam konteks Spanyol, kekuasaan memproduksi warganegara "ideal" melalui penyeragaman narasi sejarah, penindasan bahasa, dan kriminalisasi ekspresi

⁴⁴ Menocal, *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*.

⁴⁵ Jan Assmann, *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination* (Cambridge University Press, 2011).

⁴⁶ lihat: al-Maqqarī, *Nafh al-Ṭīb min Ghushn al-Andalus al-Raṭīb*, Beirut: Dār Ṣādir.

memori kolektif. Dalam beberapa generasi, hasilnya adalah transformasi psikososial Masyarakat, mereka tidak hanya dipisahkan dari warisan Islam mereka, tetapi bahkan dilatih untuk memandangnya dengan rasa malu, curiga, atau jijik. Inilah bentuk ekstrem dari kolonisasi ingatan dan pendangkalan sejarah sebagai instrumen kuasa.

Meskipun proyek de-Islamisasi Spanyol pasca-Reconquista berhasil menghapus sebagian besar simbol dan ekspresi lahiriah Islam dari ruang publik dan sejarah resmi, jejak-jejak warisan Islam tetap bertahan dalam bentuk yang lebih subtil dan tersembunyi. Dalam bahasa sehari-hari, sejumlah kosakata Arab tetap melekat dalam bahasa Spanyol modern—seperti *aceituna* (zaitun), *almohada* (bantal), *alcalde* (wali kota), atau *ojalá* (yang berasal dari ungkapan doa: *in shā' Allāh*). Jejak arsitektur Islam pun masih bisa ditemui di bangunan-bangunan kuno di Córdoba, Sevilla, dan Granada, yang meski telah dialihfungsikan menjadi katedral atau istana, tetap menyimpan unsur geometris dan artistik khas peradaban Islam. Bahkan dalam seni musik dan kuliner rakyat Spanyol selatan, pengaruh Andalusia masih dapat dirasakan secara kultural, meskipun sering tidak diakui secara eksplisit.

Warisan terselubung ini hari ini menjadi titik tolak bagi upaya rekonstruksi sejarah yang dilakukan oleh kalangan akademik—baik dari dunia Islam maupun sarjana non-Muslim. Sejarawan seperti Hussein Mones, Anwar G. Chejne, dan lebih kontemporer seperti María Rosa Menocal dan Brian A. Catlos, telah membuka kembali tabir narasi hegemonik yang menyingkirkan kontribusi umat Islam terhadap kebudayaan Eropa. Mereka menelusuri ulang dokumen, manuskrip, dan warisan intelektual yang selama berabad-abad disembunyikan, disalahartikan, atau diabaikan. Bahkan di Spanyol sendiri, mulai muncul gerakan budaya dan komunitas yang berupaya merekonstruksi kembali identitas Andalusia dengan pendekatan lintas budaya dan multireligius, sebagai bentuk resistensi terhadap narasi monolitik nasionalisme Katolik.

Politik ingatan (*politics of memory*) kini menjadi medan baru perlawanan intelektual terhadap manipulasi sejarah. Rekonstruksi sejarah Islam di Al-Andalus bukan sekadar upaya mengingat masa lalu, tetapi juga bagian dari perjuangan kontemporer dalam menegaskan pluralitas sejarah manusia dan menantang narasi-narasi eksklusif yang dijadikan dasar legitimasi kekuasaan budaya. Dalam konteks ini, karya-karya seperti *Nafḥ al-Ṭīb* karya al-Maqqarī dan *Bayān al-Mughrib* karya Ibn Idhārī tidak hanya penting secara historiografis, tetapi juga sebagai bentuk resistensi naratif terhadap pemutihan sejarah yang menafikan delapan abad kontribusi Islam di Semenanjung Iberia. Upaya-upaya ini, meski lambat, menunjukkan bahwa memori yang ditekan tidak selalu hilang, melainkan menunggu waktu dan ruang yang tepat untuk kembali bersuara.

Dengan demikian de-islamisasi dalam konteks pasca-Reconquista tidak hanya merujuk pada pengusiran fisik umat Islam dari Semenanjung Iberia, tetapi juga merupakan proyek politik ingatan yang bertujuan merekonstruksi sejarah dan identitas secara sistematis. Proses ini dijalankan melalui berbagai indikator konkret yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam menghapus jejak Islam dari ruang sosial, kultural, dan simbolik. Salah satu bentuk paling nyata adalah pelarangan penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan publik maupun privat, yang secara langsung memutus transmisi pengetahuan dan tradisi intelektual Islam. Selain itu, terjadi perubahan nama tempat (toponimi) dari istilah Arab ke dalam bentuk Kastilia atau Latin sebagai bagian dari upaya simbolik untuk menghapus memori geografis Islam. Dalam ranah intelektual, pembakaran dan pelarangan manuskrip berbahasa Arab menjadi strategi penting untuk menghentikan keberlanjutan warisan keilmuan Islam. Sementara itu, dalam dimensi spasial, rekonstruksi ruang ibadah melalui alih fungsi masjid menjadi gereja atau penghancuran elemen arsitektur Islam menunjukkan upaya sistematis dalam mengubah lanskap visual dan religius masyarakat. Seluruh praktik ini memperlihatkan bahwa de-Islamisasi bukan sekadar dampak dari perubahan kekuasaan, melainkan bagian dari strategi hegemonik untuk mengendalikan ingatan kolektif dan menentukan narasi sejarah yang sah. Dengan demikian, manipulasi sejarah dalam konteks ini tidak hanya terjadi pada level teks, tetapi juga melalui bahasa, ruang, simbol, dan praktik sosial yang secara bersama-sama membentuk identitas baru Spanyol yang berlandaskan hegemoni Katolik.

Kekuasaan dan Produksi Narasi Sejarah

Narasi sejarah tidak pernah bebas nilai; ia selalu berada dalam orbit kekuasaan. Pertanyaan “siapa yang berhak menulis sejarah” sejatinya adalah pertanyaan politis, sebab ia menyangkut siapa yang mengendalikan cara masyarakat mengingat dan memahami masa lalu mereka. Dalam kerangka ini, penulisan sejarah bukan sekadar upaya merekam peristiwa, tetapi tindakan produksi makna yang sarat kepentingan ideologis dan hegemonik.⁴⁷ Pasca-Reconquista, monarki Katolik Spanyol menyadari bahwa dominasi militer atas wilayah tidak cukup; mereka juga harus menguasai medan simbolik dan memori kolektif. Maka, sejarah ditulis ulang untuk menegaskan bahwa Kristenlah pemilik sah Iberia, dan bahwa Islam hanyalah “intervensi asing” yang merusak tatanan ilahi yang semula telah ditegakkan oleh bangsa Visigoth Kristen.

Dalam proyek ini, sejarawan istana seperti Ambrosio de Morales dan Juan de Mariana tidak bertindak sebagai pencatat objektif, melainkan sebagai “arsitek narasi nasional” yang melayani kepentingan kekuasaan. Mereka

⁴⁷ Michel-Rolph Trouillot, *Silencing the Past: Power and the Production of History* (Beacon press, 2015), p. 25-26.

menyusun sejarah dalam narasi linier dan teleologis yang menghubungkan masa lalu Kristen kuno (Visigoth) dengan kebangkitan kembali Kristen melalui Reconquista, sementara masa keemasan Islam di Al-Andalus direduksi menjadi bab gelap yang menyimpang dari takdir sejarah Spanyol. Islam tidak dibaca sebagai bagian dari sejarah lokal, melainkan sebagai gangguan transien yang pantas dihapus demi kemurnian identitas nasional. Konsepsi ini bukan hanya historis, tapi juga teologis—dalam narasi Katolik, pembebasan Granada dilihat sebagai penggenapan kehendak Tuhan dan kemenangan iman yang benar atas kesesatan.⁴⁸ Penghapusan peran Islam dari sejarah Spanyol adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai “epistemic violence”, yakni kekerasan simbolik yang dilakukan melalui pengendalian pengetahuan dan representasi sejarah. Sejarah menjadi alat untuk membentuk imajinasi kolektif; siapa “kita”, siapa “mereka”, mana yang sah dan mana yang menyimpang. Dalam konteks ini, menjadi “Spanyol” didefinisikan secara eksklusif sebagai menjadi “Kristen”, dan segala warisan Islam—bahkan yang sudah terinternalisasi dalam budaya local—dianggap sebagai noda yang harus dibersihkan. Dengan demikian, penulisan sejarah berperan aktif dalam mendefinisikan batas-batas identitas nasional dan agama secara eksklusif dan represif.

Sejarawan Muslim klasik menyadari pentingnya kontrol atas penulisan sejarah. Ibn Khaldūn dalam *Muqaddimah*-nya mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi medan tafsir atas makna peradaban. Ia mengkritik sejarawan yang menulis atas dasar sentimen kelompok atau tekanan penguasa, karena “kebohongan banyak menyusup ke dalam sejarah” (*kathīr fīhi al-kadhib*).⁴⁹ Dalam kasus Al-Andalus, sejarah yang ditulis oleh sejarawan Muslim seperti Ibn Ḥayyān, al-Maqqarī, dan Ibn al-Khaṭīb merekam narasi dari sisi peradaban Islam—berfokus pada capaian intelektual, budaya kosmopolitan, dan nilai-nilai koeksistensi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi.⁵⁰ Narasi mereka tidak hanya mendokumentasikan perkembangan politik dan intelektual, tetapi juga menampilkan Al-Andalus sebagai bagian integral dari jaringan keilmuan dunia Islam yang lebih luas, dari Baghdad hingga Kairowan. Namun, pasca-1492, setelah jatuhnya Granada dan ditegakkannya dominasi monarki Katolik, karya-karya ini secara sistematis disingkirkan dari kanon sejarah resmi. Narasi sejarah yang berasal dari perspektif Islam dianggap subversif terhadap proyek identitas nasional yang baru—yakni identitas Katolik murni yang menolak pluralitas masa lalu.

⁴⁸ Henry Arthur Francis Kamen, “Empire: How Spain Became a World Power, 1492-1763,” (HarperCollins), 2003. p. 62-65.

⁴⁹ Khaldun, “The *Muqaddimah*, Trans. Franz Rosenthal. p. 6.”

⁵⁰ Ibn Ḥayyān dan Ibn al-Khaṭīb mendokumentasikan dinamika sosial, politik, serta perkembangan intelektual di berbagai kota seperti Córdoba dan Granada Lihat: Maribel Fierro, “‘Abd Al-Raḥmān III and the Caliphate of Cordoba,” in *The Routledge Hispanic Studies Companion to Medieval Iberia* (Routledge, 2021), 152-66.

Sebagai bagian dari kebijakan de-Islamisasi intelektual, banyak manuskrip Arab yang memuat sejarah dan pemikiran Islam dimusnahkan melalui pembakaran besar-besaran, seperti yang terjadi di Granada di bawah perintah Kardinal Cisneros pada 1499, di mana lebih dari 80.000 naskah Arab dihancurkan di Plaza Bib-Rambla.⁵¹ Kehilangan ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, ia mencerminkan upaya mencabut ingatan kolektif umat Islam dari tanah Iberia. Dengan musnahnya teks-teks utama tersebut, akses generasi berikutnya terhadap narasi alternatif menjadi sangat terbatas, dan sejarah Al-Andalus dikonstruksi ulang secara sepihak oleh otoritas Kristen. Akibatnya, selama berabad-abad, persepsi terhadap Al-Andalus dalam historiografi Eropa didominasi oleh sudut pandang hegemonik yang mengabaikan atau mereduksi kontribusi Islam, sambil meminggirkan kompleksitas sejarah koeksistensi yang pernah menjadi ciri khas wilayah tersebut.

Peninjauan atas Reconquista tidak semata-mata soal pergantian kekuasaan dari Muslim ke Kristen, melainkan soal bagaimana kekuasaan membentuk, menghapus, dan mereproduksi narasi sejarah demi melanggengkan identitas dominan. Proyek de-Islamisasi pasca-1492 menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah netral; ia adalah arena kontestasi di mana ingatan, identitas, dan kekuasaan saling bertaut. Dalam hal ini, sejarah menjadi instrumen hegemonik; dengan menghapus simbol, manuskrip, dan narasi Islam dari ruang publik serta institusi pendidikan, monarki Katolik berupaya merekonstruksi masa lalu demi membangun masa depan yang sesuai dengan proyek identitas nasional Katolik yang tunggal dan eksklusif.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh para sejarawan kritis kontemporer, sejarah yang dibungkam tidak selalu lenyap. Fragmen-fragmen warisan Al-Andalus baik dalam bentuk bahasa, arsitektur, maupun memori kultural terus hidup dalam kesadaran bawah tanah rakyat. Dalam konteks ini, tugas penulisan ulang sejarah menjadi bentuk resistensi terhadap kolonisasi memori, sekaligus jalan untuk merebut kembali martabat intelektual dan spiritual peradaban yang dihapus. Dengan demikian, memahami Reconquista bukan hanya tentang memahami sejarah militer atau politik, melainkan juga memahami bagaimana narasi dibentuk oleh kuasa, dan bagaimana kuasa bergantung pada narasi untuk mempertahankan legitimasi. Di tengah upaya kontemporer untuk merestorasi kembali pluralitas dan koeksistensi sejarah Iberia, kita diajak untuk tidak hanya membaca sejarah sebagai fakta masa lalu, tetapi juga sebagai medan perjuangan ideologis yang terus berlanjut dalam tafsir masa kini dan visi masa depan.

⁵¹ Leonard Patrick Harvey, *Muslims in Spain, 1500 to 1614* (University of Chicago Press, 2005), p. 25-27.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses Reconquista dan Inkuisisi di Spanyol tidak semata-mata merupakan rangkaian peristiwa keagamaan atau konflik militer, melainkan bagian dari politik kekuasaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Reconquista berfungsi sebagai instrumen legitimasi ekspansi politik kerajaan-kerajaan Kristen melalui kerangka perang suci, sementara Inkuisisi beroperasi sebagai mekanisme institusional untuk meneguhkan otoritas negara dan Gereja atas tubuh, keyakinan, serta identitas sosial masyarakat. Keduanya mencerminkan relasi kuasa yang bekerja tidak hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui produksi wacana, hukum, dan simbol-simbol religius yang menormalisasi dominasi serta menyingkirkan kelompok yang dianggap “lain”.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa de-Islamisasi di Spanyol berlangsung secara sistematis dan berlapis dalam ruang sosial dan sejarah. Proses tersebut tidak berhenti pada penghapusan kekuasaan politik Islam, tetapi dilanjutkan melalui kebijakan konversi paksa, kriminalisasi praktik keagamaan Muslim, pengawasan kehidupan privat, serta penghapusan memori kolektif Islam dari narasi resmi sejarah. Mekanisme ini menghasilkan bentuk penindasan yang bersifat struktural dan jangka panjang, mendorong lahirnya komunitas crypto-Muslims yang menjalankan identitas keagamaannya secara tersembunyi. Dengan demikian, de-Islamisasi dapat dipahami sebagai strategi kekuasaan yang bertujuan tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga merekayasa ulang identitas, ingatan, dan keberadaan sosial umat Islam dalam sejarah Spanyol.

Secara akademik, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian historiografi kritis dengan menegaskan bahwa sejarah tidak bersifat netral, melainkan merupakan arena produksi makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam menentukan apa yang diingat dan apa yang dilupakan. Dalam konteks studi memori kolektif, penelitian ini menunjukkan bagaimana penghapusan simbol, bahasa, dan tradisi intelektual Islam berperan dalam membentuk ingatan historis yang selektif dan hegemonik. Relevansi kontemporer dari kajian ini juga tampak dalam cara narasi sejarah Eropa modern masih kerap mereproduksi citra Islam sebagai “yang lain”, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap munculnya Islamophobia dalam berbagai bentuk diskursus sosial dan politik di Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembacaan ulang sejarah secara kritis dan inklusif, tidak hanya untuk merekonstruksi masa lalu secara lebih adil, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih proporsional terhadap hubungan Islam dan Eropa dalam konteks global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Mahfudhoh, and Agus Mahfudin Setiawan. "The Brilliant Legacy of Islam in Andalusia 711-1492: The Influence of Islamic Civilization's Golden Age on Europe's Renaissance." *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2024).
- Arié, Rachel. "L'Espagne Musulmane Au Temps Des Naşrides (1232-1492)." (No Title), 1973.
- Assmann, Jan. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press, 2011.
- Burnett, Charles. "The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in Toledo in the Twelfth Century." *Science in Context* 14, no. 1-2 (2001): 249-88. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0269889701000096>.
- Catlos, Brian A. *Kingdoms of Faith: A New History of Islamic Spain*. Oxford University Press, 2018.
- Collins, Roger. *The Arab Conquest of Spain: 710-797*. John Wiley & Sons, 1995.
- Fierro, Maribel. "'Abd Al-Raḥmān III and the Caliphate of Cordoba.'" In *The Routledge Hispanic Studies Companion to Medieval Iberia*, 152-66. Routledge, 2021.
- Glick, Thomas F. *Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages*. Princeton University Press Princeton, NJ, 1979.
- Harvey, Leonard Patrick. *Muslims in Spain, 1500 to 1614*. University of Chicago Press, 2005.
- Homza, Lu Ann. *Religious Authority in the Spanish Renaissance*. Johns Hopkins University Press, 2000.
- Iqbal, Rahmat, and Agus Mahfudin Setiawan. "PERPUSTAKAAN ISLAM CORDOBA: KIBLAT PERADABAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DINASTI BANI UMAYYAH II 961-976 M." *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 3, no. 1 (2024): 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i1.1386>.
- Kamen, Henry. *The Spanish Inquisition: A Historical Revision*. Yale University Press, 2014.
- Kamen, Henry Arthur Francis. "Empire: How Spain Became a World Power, 1492-1763." (No Title), 2003.
- Kennedy, Hugh. *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus*. Routledge, 2014.
- Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*. Taylor & Francis, 2022.
- Khaldun, Ibn. "The Muqaddimah, Trans. Franz Rosenthal." *The Muqaddimah: An Introduction to History*, 1958.
- Khaldun, Ibn, and Vincent-Mansour Monteil. *Al-Muqaddima. Sindbad*, 1967.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka, 2005.
- Leaman, Oliver. *Averroes and His Philosophy*. Routledge, 2013.
- Maimonides, Moses. *The Guide for the Perplexed*. Vol. 351. Courier Corporation, 1956.
- Masykuroh, Siti, Uswatun Hasanah, and Agus Mahfudin Setiawan. *Sejarah Peradaban Islam: Pra Islam Hingga Tiga Kerajaan Besar Islam (Abad Ke 7-19)*. Lampung: RIL PRESS, 2024.
- Matondang, Abdul Rahman, Sufrida Said, and Luthfi Luthfi. "Sejarah Islam Di

- Spanyol: Dualisme Makna Antara Penyebaran Agama Dan Kolonialisme Islam.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (2023): 169-84.
- Menocal, Maria Rosa. *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*. Hachette UK, 2009.
- Muhammad al-Maqqari, Ahmad ben. *Nafh Al-Tib: Min Gusn Al-Andalus Al-Ratib*. Dar Sader, 1968.
- Nur Fitriyana, Nur Fitriyana. “INKUISISI GEREJA KATOLIK TERHADAP UMAT ISLAM DI SPANYOL.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (January 24, 2017): 213-30. <https://doi.org/10.19109/jia.v17i2.1085>.
- O’callaghan, Joseph F. *A History of Medieval Spain*. Cornell University Press, 2013.
- Pearce, Jen. “Book Review: On Earth or in Poems: The Many Lives of Al-Andalus by Eric Calderwood.” *Literature & History* 33, no. 1 (May 1, 2024): 56-59. <https://doi.org/10.1177/03061973241248369>.
- Perry, Mary Elizabeth. “The Handless Maiden: Moriscos and the Politics of Religion in Early Modern Spain,” 2013.
- Ritonga, Muhammad Akbar, and Johan Septian Putera Hamzah. “Strategi Thariq Bin Ziyad Menaklukkan Andalusia 711-714 M.” *Journal of Islamic History* 1, no. 2 (2021): 138-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jih.v1i2.102>.
- Safoui, Latifa. “From Heresy in Religion to Heresy in Culture: The Symbolic Power of the 15th Century Spanish Inquisition: The Case of the Arab Muslims (Moriscos).” *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926* 2, no. 2 (2023).
- Said, Edward W. *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Setiawan, Agus Mahfudin, and Ahmad Sodikin. “MISI DAKWAH ISLAM MASA BANI UMATYAH 661-750 M.” *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023).
- Sezgin, Fuat, M Amawi, F Benfeghoul, Jan P Hogendijk, and E Neubauer. *Zeitschrift Für Geschichte Der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften*, 1984.
- Sholihah, Husna Amalina, and Khairunnisa Etika Sari. “Kontribusi Perpustakaan Islam Terhadap Era Renaisans Di Eropa: Perspektif Historis.” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4, no. 2 (2023): 48-55. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1921>.
- Sivers, Peter Von. “Anwar G. Chejne, *Muslim Spain: Its History and Culture* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1974). Pp. Xvi + 559.” *International Journal of Middle East Studies* 6, no. 3 (1975): 345-47. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020743800022911>.
- Trouillot, Michel-Rolph. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Beacon press, 2015.
- Wolf, Kenneth Baxter. *Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain*. Vol. 9. Liverpool University Press, 1999.